

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Chandra, 2016, Modul Belajar Brevet A & B Padyangan Tax Center: Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2009, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit Buku Berita Pajak: Jakarta.
- Edy Suprianto, 2011, **Akuntansi Perpajakan**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Madenatera: Medan
- Herry Purwono, 2010, **Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak**, Penerbit Erlangga: Jakarta
- Hotmaida Br Silaban, 2012, **Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Pada Pegawai Yaitu Dosen UPN "VETERAN" Yogyakarta)**, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN": Yogyakarta.
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20237-penghitungan-angsuran-pph-pasal-25-bagi-wajib-pajak-menurut-peraturan-menteri-keuangan-nomor-208-pmk-03-2009>.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono, 2010, **Ensiklopedia Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, **Perpajakan Edisi Revisi 2011**, CV Andi: Yogyakarta
- Punaji Setyosari, 2010, **Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan**, Kencana: Jakarta.
- Rois Arifin, 2014, **Pengantar Manajemen**, Penerbit EmpatDua: Malang
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal**, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Siti Resmi, 2016, **Teori dan Kasus Edisi**, edisi sembilan, buku pertama, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Suandy Early, 2010, **Perpajakan**, edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Sukarna, 2011, **Dasar-Dasar Manajemen**, Penerbit Mandar Maju: Bandung

Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2010, **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**, edisi pertama, Penerbit Andi: Yogyakarta.

Usman Effendi, 2014, **Asas Manajemen**, Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

www.pajak.go.id

Ziski Azis, dkk., 2016, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Penerbit Madentera: Medan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Sebanyak 26 Wajib Pajak Sebelum Dilakukan Pengawasan dan Setelah Dilakukan Pengawasan Di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Pajak 2013

NO	Penerimaan Tahun 2013 Sebelum Pengawasan	Penerimaan Tahun 2013 Setelah Pengawasan
1	Rp 7.083.600	Rp 7.348.000
2	Rp 6.973.100	Rp 6.999.100
3	Rp 6.760.000	Rp 6.837.000
4	Rp 5.794.500	Rp 5.438.600
5	Rp 5.245.000	Rp 5.200.000
6	Rp 4.680.000	Rp 4.700.000
7	Rp 3.250.000	Rp 3.300.000
8	Rp 4.678.000	Rp 4.700.000
9	Rp 2.244.000	Rp 2.550.000
10	Rp 3.350.000	Rp 3.400.000
11	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
12	Rp 6.007.800	Rp 6.100.000
13	Rp 15.622.000	Rp 15.500.000
14	Rp 14.947.800	Rp 14.950.000
15	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
16	Rp 1.250.000	Rp 1.300.000
17	Rp 5.670.000	Rp 5.670.000
18	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
19	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
20	Rp 9.831.250	Rp 9.931.250
21	Rp 2.790.000	Rp 2.792.000
22	Rp 1.560.000	Rp 1.550.000
23	Rp 12.637.050	Rp 13.665.950
24	Rp 1.690.000	Rp 1.690.000
25	Rp 9.670.000	Rp 9.670.000
26	Rp 731.000	Rp 750.000

Jlh	Rp	154.365.100	Rp	156.441.900
-----	----	-------------	----	-------------



Lampiran 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Sebanyak 35 Wajib Pajak Sebelum Dilakukan Pengawasan dan Setelah Dilakukan Pengawasan Di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Pajak 2014

N O	Penerimaan Tahun 2014 Sebelum Pengawasan	Penerimaan Tahun 2014 Setelah Pengawasan
1	Rp 12.039.200	Rp 13.013.100
2	Rp 9.930.000	Rp 10.803.100
3	Rp 6.786.181	Rp 8.996.840
4	Rp 4.374.300	Rp 6.416.000
5	Rp 5.068.688	Rp 5.232.625
6	Rp 4.642.929	Rp 4.442.929
7	Rp 3.947.000	Rp 4.047.000

8	Rp	3.277.430	Rp	3.278.860
9	Rp	1.950.000	Rp	2.400.000
10	Rp	1.708.000	Rp	2.216.000
11	Rp	950.264	Rp	963.719
12	Rp	6.085.000	Rp	6.424.000
13	Rp	525.669	Rp	549.049
14	Rp	4.000.000	Rp	4.350.000
15	Rp	12.938.000	Rp	13.782.000
16	Rp	2.620.000	Rp	3.180.000
17	Rp	17.395.753	Rp	18.700.978
18	Rp	3.646.790	Rp	4.203.617
19	Rp	884.497	Rp	1.907.864
20	Rp	2.094.967	Rp	2.116.438
21	Rp	1.259.615	Rp	1.284.979
22	Rp	1.129.438	Rp	1.425.637
23	Rp	4.540.000	Rp	4.550.000
24	Rp	1.421.000	Rp	1.482.000
25	Rp	12.400.000	Rp	14.405.000
26	Rp	300.000	Rp	500.000
27	Rp	1.900.000	Rp	2.000.000
28	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
29	Rp	2.980.000	Rp	2.900.000
30	Rp	6.780.000	Rp	7.880.000
31	Rp	1.590.000	Rp	2.600.000
32	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
33	Rp	9.800.000	Rp	9.800.000
34	Rp	1.467.000	Rp	1.467.000
35	Rp	4.320.000	Rp	4.320.000
Jlh	Rp	165.751.721	Rp	182.638.735

Lampiran 3. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Sebanyak 39 Wajib Pajak Sebelum Dilakukan Pengawasan dan Setelah Dilakukan Pengawasan Di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun Pajak 2015

N	Penerimaan Tahun 2015	Penerimaan Tahun 2015
----------	------------------------------	------------------------------

O	Sebelum Pengawasan		Setelah Pengawasan	
1	Rp	12.605.000	Rp	14.700.000
2	Rp	12.890.000	Rp	13.890.000
3	Rp	15.064.941	Rp	18.087.650
4	Rp	10.540.792	Rp	11.711.800
5	Rp	8.207.616	Rp	10.750.125
6	Rp	6.578.000	Rp	10.039.000
7	Rp	5.706.938	Rp	6.025.825
8	Rp	15.510.152	Rp	17.696.000
9	Rp	2.875.740	Rp	5.518.354
10	Rp	1.280.325	Rp	3.981.385
11	Rp	2.450.000	Rp	2.700.000
12	Rp	1.556.000	Rp	3.731.500
13	Rp	899.676	Rp	1.036.192
14	Rp	1.020.960	Rp	1.091.629
15	Rp	4.070.114	Rp	6.005.135
16	Rp	3.200.000	Rp	4.800.000
17	Rp	739.700	Rp	1.223.800
18	Rp	5.600.000	Rp	5.600.000
19	Rp	2.570.000	Rp	4.270.000
20	Rp	3.350.000	Rp	4.533.000
21	Rp	5.050.000	Rp	7.100.000
22	Rp	6.392.750	Rp	7.910.410
23	Rp	1.350.000	Rp	2.300.000
24	Rp	10.650.000	Rp	11.900.000
25	Rp	2.000.000	Rp	4.000.000
26	Rp	8.700.000	Rp	8.700.000
27	Rp	6.500.000	Rp	6.000.000

28	Rp 2.390.000	Rp 2.000.000
29	Rp 7.560.000	Rp 7.560.000
30	Rp 3.270.000	Rp 3.270.000
31	Rp 6.690.000	Rp 3.270.000
32	Rp 10.870.000	Rp 10.900.000
33	Rp 8.987.000	Rp 9.990.000
34	Rp 11.559.000	Rp 11.559.000
35	Rp 1.379.000	Rp 1.479.000
36	Rp 1.228.000	Rp 1.600.000
37	Rp 6.600.000	Rp 6.690.000
38	Rp 2.500.000	Rp 4.500.000
39	Rp 976.000	Rp 1.076.000
Jlh	Rp 221.367.704	Rp 259.195.805

Lampiran 4. Lembar Pengawasan Arus Dokumen

Lampiran 5. Surat Teguran

KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : _____
 Tanggal : _____

Nama : _____
 Alamat : _____
 Jenis Pajak : _____

N.P.W.P. : _____
 No. P.K.P. : _____
 Ms/Thn pajak : _____

TEMPAT PELAYANAN TERPADU

Urutan	Pft/Tg
Surat diterima : 1. langsung	
2. melalui pos	

SEKSI TERKAIT

Urutan	Pft/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

PENGELAAAN SPT. Tahunan Pph / masa PPN

Urutan	Pft / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :	
2. Diterima Seksi	
3. Selesai diproses	

PENGOLAHAN SPT

Urutan	Pft / Tg
1. Dicapai pada 1Q - 1	
2. Selesai di-dit	
3. Selesai direkam	
4. Dicapai pada 1Q - 2	

PEMERIKSAAN

Urutan	Pft / Tg
1. Lengkap	
2. Sederhana :	
2.1. Lapangan	
2.2. Kantor	

PENGARSIPAN

Urutan	Pft / Tg
1. S.T.P	
2. S.K.P.N	
3. S.K.P.K.B	
4. S.K.P.K.B.T	
5. S.K.P.L.B	

RESTITUSI

Urutan	Pft / Tg
1. S.K.P.P.P	
2. S.P.M.K.P	

PENYIDIKAN

Urutan	Pft / Tg
1. Diberitahukan kepenuntut umum	
2. Penyidikan	
3. Selesai dititik	
4. Disampaikan kepenuntut umum	

PENETAPAN

Urutan	Pft / Tg
1. S.T.P	
2. S.K.P.N	
3. S.K.P.K.B	
4. S.K.P.K.B.T	
5. S.K.P.L.B	

RESTITUSI

Urutan	Pft / Tg
1. S.K.P.P.P	
2. S.P.M.K.P	

PENGARSIPAN

Urutan	Pft / Tg
1. Dimasukkan keinduk berkas	
2. Diteruskan ke :	
3. Diterima kembali	

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : _____

Nama : _____
 Alamat : _____
 Jenis Pajak : _____

N.P.W.P. : _____
 No. P.K.P. : _____
 Ms/Thn Pajak : _____

Pelugas penerima, _____
 NIP : _____

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon : _____
 Facsimile : _____

A.n. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Terima kasih atas kerjasama Saudara

lata usaha kami. tersebut di atas, kami harapkan copynya dikirimkan kepada kami untuk dicatat dalam Dalam hal Saudara telah menyampaikan Surat Pembertitahuan Masa untuk Masa Pajak patkan, kami akan menerapkan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983. Apabila sesudah batas waktu tersebut Surat Pembertitahuan Masa belum juga disan- Surat Tegoran ini. Masa tersebut dalam jangka waktu () hari sejak tanggal Oleh karenanya kami minta agar Saudara menyampaikan Surat Pembertitahuan

masa pajak tersebut diatas. 19 yang batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari Pembertitahuan Masa Pajak Perantaraan Nilai untuk masa pajak Menunuti carian pada lata usaha kami, Saudara belum menyampaikan Surat

No. Pengukuran PKP

N.P.W.P

SURAT TEGORAN

No.

Yth.

KEPADA :

BEBAS BEA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak
Alamat WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 - XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 - XXX.000</p> <p>2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.</p> <p>Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	
NOP	diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Alamat Objek Pajak	diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
<p>Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II (Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran) untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor
<p>Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) <u>hanya</u> apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., **Tanggal**

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., **Tanggal**

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran